

PENDIDIKAN POLITIK: MEMBANGUN DEMOKRASI, NEGARA-BANGSA DAN MASYARAKAT MADANI DALAM PANDANGAN HATTA

Zulfikri Suleman

FISIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

Abstrak

Apabila istilah-istilah "demokrasi", "negara-bangsa" dan "masyarakat madani" bisa diganti dengan "negara Indonesia yang bersatu, demokratis dan sejahtera", Indonesia sampai dewasa ini masih menghadapi berbagai masalah dalam mewujudkannya. Berbagai masalah tersebut antara lain bersumber dari terabaikannya keharusan untuk mendidik rakyat agar menjadi warganegara yang sadar akan hak dan tanggungjawabnya dalam kehidupan bersama, yang merupakan keniscayaan dalam tatanan demokrasi yang bersatu dan menyejahterakan rakyat. Akibatnya, yang terjadi kemudian adalah kebebasan yang cenderung anarkhis sebagaimana kita alami selama era Reformasi sekarang ini, yang mencerminkan kecenderungan pelaku-pelaku yang lebih mementingkan hak daripada tanggungjawab. Tulisan ini ingin mengungkapkan pemikiran Mohammad Hatta mengenai pendidikan politik bangsa, gagasan yang sudah dilaksanakan Hatta bersama Sjahrir dan tokoh-tokoh lainnya sejak awal tahun 1930-an melalui organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Tujuan pengungkapan ini adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa berdemokrasi tanpa kehadiran pelaku-pelaku yang bertanggungjawab hanya akan menjauhkan kita dari tujuan-tujuan nasional yang hendak dicapai. Melalui kajian-kajian atas tulisan-tulisan Hatta yang relevan serta kegiatan Hatta melalui Pendidikan Nasional Indonesia, ingin dikemukakan nanti bahwa Hatta sudah sejak awal meyakini bahwa pendidikan politik merupakan langkah awal untuk membangun tatanan Indonesia yang bersatu, demokratis dan sejahtera.

Pengantar

Apabila berbagai krisis yang mendera bangsa Indonesia sejak dua belas tahun belakangan ini, yang oleh sebagian kalangan dianggap mulai menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dicermati, maka akar penyebabnya dapat dirumuskan dalam bentuk krisis moral yang menghinggapi, terutama, lapisan elit kepemimpinan kita. Tuna moralitas menyebabkan ketiadaan kesadaran untuk memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Sebaliknya, yang senantiasa mengemuka adalah klaim kebenaran sepihak

sembari menafikkan keberadaan dan hak golongan lain. Padahal Hatta jauh hari sudah meyakinkan kita, "*Syarat pertama untuk menjadi bangsa yang merdeka adalah keinsyafan, bahwa kita adalah satu bangsa yang bersatu padu, yaitu bangsa Indonesia, yang bertanah air Indonesia*"¹.

Memang, salah satu kelemahan kita, khususnya dari kalangan generasi muda, adalah ketidakpedulian terhadap sejarah kehidupan bangsa. Tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini muncul desakan untuk memperkuat program sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa. Padahal menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo², identitas suatu bangsa terkubur dalam sejarah masa lalu bangsa tersebut, dalam bentuk pemikiran, kejuangan dan teladan perilaku para bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*). Dengan kata lain, penemuan dan pengembangan identitas kita sebagai bangsa Indonesia hanya dapat dilakukan apabila kita (pelajar, mahasiswa, pejabat dan masyarakat awam) memahami dengan baik sejarah masa lalu bangsa kita, khususnya pemikiran, kepribadian dan nilai-nilai kejuangan para pejuang kemerdekaan kita.

Tulisan ini membahas pandangan Hatta tentang cara-cara membangun demokrasi, negara-bangsa dan masyarakat madani di negara kita melalui pendidikan politik³, yang menggambarkan pemikiran dan aktivitas Hatta, termasuk melalui PNI Baru, dalam mendidik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa sudah sejak sebelum kemerdekaan salah satu bapak pendiri bangsa kita memiliki konsepsi yang jelas tentang apa yang dalam konteks forum ini disebut demokrasi, negara bangsa dan masyarakat madani.

¹ Lihat *GATRA*, 3 Oktober 1998, hal. 93.

² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2 (Jakarta: Penerbit Gramedia), 1990, hal XV.

³ Untuk maksud yang sama, Hatta atau penulis tentang Hatta menggunakan istilah 'pendidikan' dan 'kaderisasi'; lihat Mestika Zed, "Hatta dan Kaderisasi", *KOMPAS*, 9 Agustus 2002, hal. 38. Tulisan ini menggunakan ketiga istilah tersebut secara bergantian dan untuk maksud yang sama.

Demokrasi, Negara-bangsa dan Masyarakat Madani

Tentu tidak perlu dibahas panjang-lebar dalam tulisan singkat ini tentang keterkaitan demokrasi, negara-bangsa dan masyarakat madani. Demokrasi sebagai tatanan nilai sekaligus sistem pengelolaan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat secara individual tumbuh dan berkembang di Eropa Barat dalam negara bangsa, bukan dalam tatanan imperium yang ekspansif, bukan pada masa Abad Pertengahan yang teokratis atau pada masa monarkhi absolut-feodal. C.A. Leeds⁴, menyebut pertumbuhan negara nasional sebagai salah satu kondisi yang mengawali perkembangan demokrasi di negara-negara Eropa Barat dan menambahkan bahwa perkembangan kesadaran nasional merupakan faktor yang esensial bagi perkembangan lembaga-lembaga demokrasi. Dengan demikian dapat dikemukakan, hanya dalam sistem negara-bangsa tatanan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, membangun demokrasi sekaligus berarti – terlebih dahulu – membangun negara bangsa.

Akan halnya masyarakat madani, tulisan ini tidak ingin melibatkan diri ke dalam perdebatan konseptual-teoritis. Cukup dikemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan kelas menengah dalam terminologi kaum liberal, yaitu kekuatan-kekuatan non-negara yang sadar politik dan berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan kekuasaan negara yang koruptif. Dikaitkan dengan demokrasi, masyarakat madani adalah lapisan masyarakat umum yang oleh Dede Rosyada dkk. disebut sebagai salah satu penegak demokrasi⁵.

Secara umum dapat dikemukakan, istilah-istilah “demokrasi”, “negara-bangsa” dan “masyarakat madani”, khususnya dalam konteks negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, dapat dirangkum ke dalam satu tatanan: negara nasional yang maju dalam berbagai bidang kehidupan serta mengalami proses demokratisasi dengan lancar. Untuk memudahkan pemahaman kita, dan terlepas dari setuju atau tidak setuju,

⁴ C.A. Leeds, *Political Studies*, 2nd edition (London: MacDonald & Evans, Ltd.), 1975, hal. 90.

⁵ Dede Rosyada dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cetakan kedua (Jakarta: Prenada Media), 2005, hal. 119.

negara-negara demokrasi Barat sekarang ini merupakan contoh terbaik dari pengertian yang dirangkum oleh ketiga istilah ini.

Hatta tentang Pendidikan Politik

Membangun negara nasional yang maju dan demokratis bukan merupakan hal yang baru bagi Hatta. Membangun bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka (dalam arti luas), maju dan demokratis bahkan menjadi inti dari pemikiran politik Hatta, semacam obsesi yang senantiasa dipikirkan dan diperjuangkan oleh seorang pemikir politik⁶. Untuk itu, sudah sejak awal tahun 1930an Hatta mempersiapkan konsepsi untuk menjawab pertanyaan: Indonesia seperti apa yang hendak dibangun setelah kemerdekaan nanti. Hatta menjawab pertanyaan ini melalui tulisan panjang yang berjudul *Ke Arah Indonesia Merdeka*, yang dimaksudkan sebagai manifesto politik bagi perjuangan organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Obsesi Hatta dapat dirumuskan dalam tiga kata sederhana: pendidikan politik bangsa.

Gagasan Hatta tentang pendidikan politik bangsa terbentuk melalui kesadaran dirinya sebagai bagian dari bangsa terjajah. Peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi ekonomi di Rotterdam (1921-1932) telah memberikan iklim yang kondusif dalam proses pematangan kesadaran politiknya. Tahun 1925 Hatta menjadi bendahara dalam kepengurusan Perhimpunan Indonesia (PI). Tahun berikutnya Hatta menjadi Ketua PI dan menyampaikan pidato pelantikannya yang berjudul "Sistem Perekonomian Dunia dan Pertarungan Kekuatan" (*Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen*) yang berintikan pertentangan kepentingan yang tidak bisa didamaikan antara bangsa penjajah dengan bangsa terjajah. Hatta juga menghadiri dan berpartisipasi secara aktif dalam beberapa pertemuan internasional di Eropa, yang bertujuan memperkenalkan perjuangan kemerdekaan Indonesia di fora internasional. Memang, selama sebelas tahun di Negeri Belanda, di samping mematangkan kemampuan intelektualnya, Hatta juga lebih memfokuskan perhatiannya pada pembentukan kesadaran dan solidaritas

⁶ Lihat A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi* (Jakarta: Penerbit Pensil-324), 2004, hal. 121-130.

nasional serta memperkenalkan perjuangan kemerdekaan Indonesia di masyarakat Eropa.

Pemikiran Hatta tentang pendidikan politik bangsa ini didasarkan pada keyakinannya bahwa "politik di negeri terjajah terutama berarti pendidikan"⁷. Yang dimaksud di sini bukan pendidikan dalam arti formal saja melainkan pendidikan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Hatta menulis sebagai berikut⁸:

"Melalui pendidikan, rakyat kecil akan menyadari bahwa bukan hanya pemimpin yang memikul tanggungjawab, tetapi juga semua orang. Bukan hanya pemimpin saja yang harus berjuang, tetapi rakyat juga harus ikut serta. Ada faktor yang sering dilupakan, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin saja, melainkan oleh usaha dan keyakinan massa. Nasib rakyat Indonesia terletak di tangan rakyat itu sendiri"

Hatta juga berkeyakinan bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tidak hanya terbatas pada tercapainya kemerdekaan, melainkan akan berlanjut terus menjadi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Ini merupakan perjuangan yang panjang dan melelahkan. Hatta mengungkapkan keyakinannya⁹, "Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh kemerdekaannya kembali, itulah hukum sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Hanya soal proses (waktu) dan cara bagaimana mereka memperoleh kembali kemerdekaannya...". Dengan kata lain, menurut Hatta, yang lebih penting adalah menyiapkan calon-calon pemimpin yang akan bertugas membangun bangsa di kemudian hari.

Keyakinan Hatta tentang arti penting kaderisasi pemimpin ini diperkuat oleh kejadian setelah rentetan pemberontakan komunis tahun 1926-1927 di Sumatera Barat dan Banten, di mana pemerintah colonial Belanda dengan mudah berhasil mengatasi pemberontakan tersebut dan untuk masa selanjutnya melakukan pengawasan ketat terhadap gerakan kemerdekaan dengan menangkapi para pemimpinnya. Tindakan preventif dan represif pemerintah kolonial ini menyebabkan terjadinya kekosongan

⁷ Lihat Adnan Buyung Nasution, "Jejak Pemikiran Hatta dalam UUD 1945", *KOMPAS*, 9 Agustus 2002, hal. 37.

⁸ Lihat Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama), 1991, hal. 99

⁹ *Ibid.*

dalam kepemimpinan gerakan kemerdekaan, yang kemudian makin menyadarkan Hatta tentang arti penting pendidikan politik bagi calon-calon pemimpin dan rakyat pada umumnya.

Di samping untuk mendidik para calon pemimpin dan rakyat pada umumnya, dalam sejarahnya, gagasan Hatta tentang pendidikan politik ini seringkali dibicarakan dalam kaitannya dengan perbedaan strategi dengan Soekarno. Berbeda dengan Soekarno yang memilih strategi penggalangan massa dalam perjuangan kemerdekaan, Hatta lebih memilih cara pendidikan politik secara sistematis untuk rakyat agar tumbuh kesadaran dan tanggungjawab bersama yang kuat dalam memperjuangkan cita-cita bangsa saat itu. Dengan kata lain, Hatta tidak setuju dengan cara-cara penggalangan massa karena cara tersebut hanya akan menciptakan ketergantungan rakyat terhadap pemimpinnya. Kata Hatta¹⁰, "*Pergerakan kita tidak boleh tinggal pergerakan pemimpin, yang hidup dan mati dengan pemimpin itu. Akan tetapi pergerakan kita harus menjadi 'pergerakan pahlawan-pahlawan yang tak punya nama', artinya pergerakan rakyat sendiri, yang tidak tergantung kepada nasibnya pemimpin*".

Keyakinan Hatta tentang arti penting pendidikan politik ini di samping mengandung pengertian menentang penumpukan kekuasaan di tangan sang pemimpin yang berbau mitos, sehingga bertentangan dengan asas demokrasi, juga sekaligus mencerminkan prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengutamaan kedaulatan rakyat. Hatta pada mulanya memang berbicara tentang pendidikan politik untuk para kader partai atau calon pemimpin. Tapi dengan keyakinannya tentang sistem banyak partai, ini sekaligus mencerminkan keyakinannya bahwa segenap komponen bangsa harus memiliki kesadaran politik dan karena itu juga bertanggungjawab untuk memperjuangkan dengan teguh cita-cita bangsa, tidak hanya diserahkan kepada kemauan pemimpin dan kelompoknya. Dengan keyakinan seperti ini, dan usaha-usaha yang dilakukannya di masa-masa berikutnya, Hatta sebenarnya sudah berpikir tentang penguatan apa yang sekarang dikenal sebagai masyarakat madani (*civil society*).

¹⁰ Lihat In Nugroho Budisantoso, "Hatta Tak Pernah Kembali Sebagai Dwitunggal", *KOMPAS*, 1 Juni 2001, hal. 62.

Pendidikan Politik dalam Praktek

Aktivitas politik Hatta juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perjuangan kemerdekaan di Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui, Soekarno dan kawan-kawannya mendirikan PNI tahun 1927 di mana di dalamnya ikut bergabung kawan-kawan Hatta di Perhimpunan Indonesia sebelumnya (Sartono, Ali Sastroamidjojo dan lain-lain). Tapi terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dipikirkan Hatta dengan apa yang ditempuh Soekarno dengan PNI-nya. Bagi Hatta, perjuangan kemerdekaan berarti berjuang bersama rakyat melalui usaha menumbuhkan kesadaran politik rakyat agar nanti tumbuh tanggungjawab bersama. Sebaliknya, Soekarno mengartikan perjuangan kemerdekaan dalam arti berjuang memimpin rakyat, menggalang massa dan melakukan agitasi terhadap pemerintah kolonial. Hatta mencemaskan popularitas Soekarno yang dibangun di atas dukungan emosional rakyat yang masih belum terdidik. Ia menyarankan agar PNI melakukan pelatihan calon-calon pemimpin untuk tampil ke depan nanti seandainya Soekarno ditangkap pemerintah kolonial. Kata Hatta, "Tidak cukup kalau hanya ada satu Soekarno, sebaiknya ada ribuan dan kemudian jutaan Soekarno"¹¹. Dengan pernyataan ini, Hatta ingin mengungkapkan keyakinannya bahwa yang lebih penting adalah berjuang dengan melaksanakan pendidikan politik untuk rakyat, bukan dengan memprovokasi rakyat yang masih bodoh dan terkebelakang.

Apa yang dikhawatirkan Hatta kemudian menjadi kenyataan. Soekarno dan tiga pimpinan PNI lainnya (Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata) bulan Desember 1929 ditangkap pemerintah kolonial dan khusus untuk Soekarno dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Penangkapan Soekarno dan kawan-kawannya ini langsung meredupkan api perjuangan PNI. Sartono dan Anwari yang kemudian mengambil alih kepemimpinan PNI justru memerintahkan cabang-cabang PNI untuk mematuhi perintah pemerintah kolonial untuk menarik diri dari kegiatan-kegiatan politik. Bulan April 1931 Sartono membubarkan PNI dan menggantinya dengan Partindo (Partai Indonesia).

¹¹ Lihat Mavis Rose, *op.cit.*, hal. 82

Hatta kembali menyesali strategi perjuangan Soekarno dan amat kecewa dengan sikap Sartono ini yang dianggapnya sebagai penakut tapi sewenang-wenang. Hatta mengungkapkan kekecewaannya dengan ungkapan sebagai berikut¹²:

"Istilah 'demokrasi' selalu ada di bibir para pemimpin kita. Tapi dalam praktek tidak dilakukan. Rakyat dianggap sebagai keset untuk membersihkan kaki seseorang; mereka dianggap penting dalam hal bahwa mereka akan bertepuk sorak kalau seorang pemimpin menyampaikan pidato yang bagus. Tetapi mereka tidak diajari bagaimana memikul tanggungjawab atau kewajiban mereka sendiri".

Hatta juga bertekad bahwa sekembali dari Negeri Belanda ia akan melibatkan diri dalam suatu kegiatan "pedagogi sosial" yang berintikan pendidikan rakyat dalam soal-soal politik, ekonomi dan sosial sehingga rakyat menyadari sepenuhnya martabat, hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pendidikan politik dimaksudkan untuk memperluas wawasan rakyat di berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadarannya sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Pendidikan ekonomi bagi rakyat diperlukan untuk menggugah kesadaran tentang keterbelakangan mereka sekaligus member jalan untuk menemukan cara-cara pengelolaan ekonomi yang produktif untuk kemajuan mereka, misalnya melalui koperasi atau badan-badan usaha lainnya yang kelak dikenal sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Selanjutnya adalah pendidikan sosial bagi rakyat, yang oleh Hatta dimaksudkan untuk "mempertinggi keselamatan penghidupan bersama. Ini antara lain dengan member pelajaran umum dan memajukan kesadaran tentang arti disiplin, hemat, jujur, bersih, baik dalam arti kesehatan fisik mau pun bersih secara moral dan batiniah"¹³. Apabila yang terakhir ini adalah apa yang akhir-akhir ini diwacanakan oleh banyak kalangan sebagai pendidikan karakter bangsa, Hatta sesungguhnya sudah memikirkannya bahkan sejak delapan dekade yang lalu. Kita hanya perlu sedikit menyadari bahwa para bapak pendiri bangsa kita sudah menyiapkan warisan pemikiran, semangat kejuangan dan teladan perilaku tentang bagaimana mengelola kehidupan bersama sebagai satu bangsa.

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Mestika Zed, *loc.cit.*

Hatta mewujudkan tekadnya dengan menyuruh Sjahrir pulang terlebih dahulu ke Hindia Belanda untuk menghimpun kaum nasionalis yang tidak setuju dengan pemimpin-pemimpin Partindo, antara lain adalah kaum nasionalis di beberapa cabang PNI lama yang sudah mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok merdeka, bahkan ada yang sudah menggunakan nama Club Pendidikan Nasional Indonesia. Bulan Desember 1931, melalui kongres di Yogyakarta, kelompok-kelompok ini menyatukan diri menjadi organisasi Pendidikan Nasional Indonesia dengan Sukemi sebagai ketuanya. Sjahrir menggantikan Sukemi sebagai ketua PNI Baru pada bulan Juni 1932, yang selanjutnya menyerahkan jabatan ini ke Hatta setelah Hatta kembali ke tanah air bulan Agustus 1932. Bersamaan dengan itu di terbitkan *Daulat Ra'yat*, koran PNI Baru yang terbit per sepuluh hari dan berfungsi sebagai media bagi anggota-anggotanya untuk menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Sungguh suatu kemunduran yang nyata bahwa, apabila para pejuang kemerdekaan dulu sudah menyadari bahwa suatu organisasi seharusnya memiliki media sendiri untuk menyebarkan ide-idenya kepada masyarakat, hal yang mencerdaskan tersebut hampir tidak kita temui pada organisasi (politik) sekarang ini.

PNI Baru tumbuh menjadi organisasi yang baik dan rapi. Sebelum Hatta mengambil alih kepemimpinan PNI Baru, organisasi ini sudah memiliki 12 kantor cabang dan terus berkembang di bulan-bulan berikutnya. Enam bulan setelah Hatta bergabung dan menjadi ketua, PNI Baru sudah memiliki 66 pengurus cabang. Untuk masa dua tahun berikutnya Hatta dan kawan-kawannya aktif menyelenggarakan pendidikan politik untuk para kader dan rakyat biasa melalui PNI Baru dan *Daulat Ra'yat* sampai ditangkap pemerintah kolonial Belanda tahun 1934 dan bersama Sjahrir menjalani masa pembuangan yang lama di Boven Digul (dua tahun) dan Banda Neira (enam tahun) sebelum dibebaskan Belanda tahun 1942 seiring dengan kekalahan Belanda terhadap kekuatan Jepang.

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, PNI Baru merupakan wadah bagi Hatta dan kawan-kawan sepehamnya untuk menyelenggarakan pendidikan politik, khususnya untuk para kader politik. Pendidikan politik ini dilaksanakan dalam bentuk kursus-kursus

kepemimpinan, ceramah, rapat umum, kongres, menerbitkan selebaran atau brosur dan mendirikan majelis-majelis yang bertugas untuk member informasi kepada masyarakat. Dapat kita lihat di sini, bagi Hatta, pendidikan politik bukan hanya sebatas pemikiran saja melainkan langsung dilaksanakannya.

Khusus untuk para calon kader, Hatta dan Sjahrir merancang 150 pertanyaan untuk menguji pemahaman para calon kader tentang isi risalah Ke Arah Indonesia Merdeka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai dari yang paling sederhana sampai ke istilah-istilah yang lebih abstrak, antara lain¹⁴:

- Apa tujuan PNI Baru?
- Apa asas-asas PNI Baru?
- Apa yang dimaksud dengan nasionalisme?
- Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat?
- Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
- Apa yang dimaksud dengan parlemen?
- Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum?
- Siapa yang berhak memberikan suara dalam pemilihan umum?
- Apa yang dimaksud dengan liberalism?
- Apa yang dimaksud dengan individualism?
- Apa yang dimaksud oleh Montesquieu dengan otokrasi, oligarkhi, dan revolusi?
- Apa yang dipikirkan Montesquieu tentang kekuasaan?
- Mengapa Montesquieu berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi tidak ada pemberontakan?
- Apa yang anda ketahui tentang Rousseau dan ajaran-ajarannya?
- Apa yang dimaksud dengan Revolusi Industri?
- Apa yang dimaksud dengan kartel?
- Apa yang dimaksud dengan trust
- Apakah landasan demokrasi Barat?

¹⁴ Lihat J.D. Legge, *Kelompok Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), 1993, hal. 59-60.

- Di bidang apakah tidak ada persamaan dalam Demokrasi Barat?
- Di bidang apakah terdapat persamaan dalam demokrasi Barat?
- Mengapa demokrasi politik saja tidak cukup?

Secara umum dapat dikemukakan, kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Hatta dan kawan-kawannya dimaksudkan untuk membentuk kader nasionalis berwatak sosialis. J.D. Legge menduga, pendidikan politik oleh Hatta melalui PNI Baru ini mengingatkannya pada kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh Worker's Education Association (WEA, Perhimpunan Pendidikan Kaum Buruh) yang berusaha melakukan mencerdaskan di kalangan kaum buruh di Inggris di akhir abad ke-19. Penulis ini menambahkan, pendidikan politik oleh PNI Baru berakar pada tradisi sosial demokrasi Eropa dengan cirri-ciri: bersandar pada teori sosial sebagai pedoman aksi, kohenerensi pandangan dunia menurut analisis kapitalisme, imperialisme dan munculnya fasisme serta pandangan tentang penderitaan bangsa Indonesia sebagai bagian dari tatanan global.

Pendidikan politik yang diselenggarakan Hatta dan kawan-kawannya melalui PNI Baru memang tergolong singkat, hanya dua tahun, sampai ditangkapnya Hatta pada bulan Februari 1934, yang diikuti dengan penangkapan Sajhrir dan teman-temannya yang lain di bulan-bulan berikutnya. Tapi aktivitas politik mendasar dalam masa yang singkat ini telah menimbulkan momok di mata pemerintah colonial. Dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal pada bulan Januari 1934, Penasihat Urusan Pribumi menegaskan¹⁵, "Pemimpin dengan kepribadian seperti Moh. Hatta selalu berbahaya. Dalam perbandingan, tokoh revolusioner seperti Dr. Tjipto Mngunkusumo masih kekanakan-kanakan".

Hatta ditangkap bersama enam pengurus PNI Baru lainnya, yaitu Sjahrir, Bondan, Burhanuddin, Maskun, Suka Sumitro dan Murwoto. Bulan September 1934 giliran Koran *Daulat Ra'yat* yang dibrangus pemerintah colonial Belanda dan Murad sebagai

¹⁵ Lihat Mavis Rose, *op.cit.*, hal. 122.

pemimpin redaksinya juga ditahan. Bulan Januari 1935 Hatta dan keenam temannya diberangkatkan ke tempat pembuangan di Boven Digul, Irian. Dengan demikian berakhirlah kegiatan pendidikan politik Hatta dan kawan-kawannya melalui PNI Baru. Pengasingan Hatta selama lebih kurang delapan tahun tidak melemahkan komitmen pribadinya tentang arti penting pendidikan politik bagi bangsanya. Selama dua tahun pembuangan di Boven Digul Hatta tetap menyempatkan diri memberikan pengajaran kepada teman-temannya sesama tahanan atau meminjamkan buku-bukunya. Tapi program pengajaran ini memang tidak berlangsung secara rutin karena medan tahanan amat luas dan mendatangkan penyakit bagi tahanan, terutama penyakit malaria. Selama masa pembuangan di Banda Neira, Hatta dan Sjahrir juga aktif menulis dan memberikan kursus-kursus untuk rakyat setempat. Selama masa pembuangan ini, Hatta antara lain memberikan kursus Bahasa Jerman, sedangkan Sjahrir memberikan kursus Bahasa Inggris. Selama masa pembuangan ini juga, majalah dan Koran yang dilanggani Hatta dan selesai dibacanya (**De Groene Amsterdam, De Locomotief, Pemandangan, Java Bode, SK Suara Oemoem**) disuruh kirim ke pejuang-pejuang politik yang masih ditahan di Boven Digul. Ini semua membuktikan bahwa, dalam kondisi apa pun, Hatta tetap tidak melupakan usaha-usaha untuk mencerdaskan bangsanya. Pendidikan politik adalah obsesi Hatta untuk membangun demokrasi, negara-bangsa dan masyarakat madani.

P'ltibar bagi Kita

Pendidikan politik adalah konsep yang biasa, setiap orang menyadari arti pentingnya. Yang luar biasa dan visioner adalah konteks jamannya, dicetuskan Hatta sejak awal tahun 1930an, ketika bangsa Indonesia masih bergulat dengan keterjajahan, kemiskinan dan keterbelakangan. Bagi Hatta, merdeka adalah hukum besi sejarah. Yang jauh lebih penting lagi adalah menyiapkan anak bangsa sejak dini - melalui pendidikan politik - agar menjadi warganegarayang terdidik, maju dan bertanggungjawab agar kemerdekaan yang kelak diraih dapat diisi dengan pembangunan nasional yang sejahtera dan berkeadilan. Begitulah cara Hatta membayangkan pembangunan negara nasional yang maju dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, In Nugroho, "Hatta Tak Pernah Kembali Sebagai Dwitunggal", *KOMPAS*, 1 Juni 2001
- GATRA, 3 Oktober 1998.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan (I)*, Penerbit "Bulan Bintang", Jakarta, 1952.
- Leeds, C.A., *Political Studies*, 2nd edition (London: MacDonald & Evans, Ltd.), 1975.
- Legge, J.D., *Kelompok Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti).
- Nasution, Adnan Buyung, "Jejak Pemikiran Hatta dalam UUD 1945", *KOMPAS*, 9 Agustus 2002,
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1990.
- Penders, M.A., Ph.D., C.L.M., (ed.), *Mohammad Hatta, Indonesia Patriot: Memoirs*, Gunung Agung – Singapore MCMLXXXI, 1981.
- Rose, Mavis, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).
- Rosyada dkk. Dede, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, cetakan kedua (Jakarta: Prenada Media), 2005.
- Kartodirdjo, Sa'rono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2 (Jakarta: Penerbit Gramedia), 1990.
- Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS), 2010.
- Zed, Mestika, "Hatta dan Kaderisasi", *KOMPAS*, 9 Agustus 2002.
- Zainuddin, A.R., *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi* (Jakarta: Penerbit Pensil-324), 2004.